
Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya dan Sikap Pelaksana Terhadap Kinerja Organisasi dalam Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo

Siti Rahmatia Machieu

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

Email: srm232329@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the effect of communication, resources and attitudes of implementers partially and simultaneously on organizational performance in the implementation of the Local Content Curriculum in the Province of Gorontalo. The approach in this research is quantitative. The research method is ex post facto. The research design is causality. The data analysis technique used is multiple regression. The results showed that (1) communication had a positive and significant effect on organizational performance in the implementation of the Local Content Curriculum in Gorontalo Province with a determinant value of 24.90%. (2) resources have a positive and significant effect on organizational performance in the implementation of the Local Content Curriculum in Gorontalo Province with a determinant value of 22.90%. (3) the attitudes of implementers (dispositions or attitudes) have a positive and significant effect on organizational performance in the implementation of the Local Content Curriculum in Gorontalo Province with a determinant value of 36.10%. (4) Communications, resources, and attitudes of implementers jointly have a significant effect on organizational performance in the implementation of the Local Content Curriculum in Gorontalo Province with a determinant value of 82.90% while the remaining is 17.10% can be explained by other variables such as bureaucratic structure, mentality of implementing policies, systems used, networks of cooperation and interpretation and understanding of implementers regarding local regulatory policies.*

Keywords: *Organizational Performance; Curriculum Implementation; Local Content*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi (communications), sumber daya (resources) dan sikap pelaksana (dispositions or attitudes) secara parsial dan simultan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo. Pendekatan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian adalah ex post facto. Desain penelitian ini berupa kausalitas. Teknik analisis data yang digunakan yakni regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) komunikasi (communications) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 24,90%. (2) sumber daya (resources) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 22,90%. (3) sikap pelaksana (dispositions or attitudes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 36,10%. (4) Komunikasi (communications), sumber daya (resources), dan sikap pelaksana (dispositions or attitudes) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 82,90% sementara sisanya sebesar 17,10% dapat dijelaskan variabel lain seperti struktur birokrasi, mental pelaksana kebijakan, sistem yang digunakan, jejaring kerja sama serta interpretasi dan pemahaman pelaksana mengenai kebijakan peraturan daerah.

Kata Kunci: *Kinerja Organisasi; Implementasi Kurikulum; Muatan Lokal*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan

menyeluruh (Aminullah dalam Muhammad dan Barnawi, 2011). Sehingga sebuah kebijakan merupakan suatu aturan yang dibuat untuk diimplementasikan dalam suatu kegiatan pemerintahan, salah satunya mengenai kebijakan dalam pendidikan.

Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kehidupan manusia ini berakhir. Merujuk pada payung hukum Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) 1 yang kemudian ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia". Berdasarkan ketentuan legal formal diatas, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam realisasinya. (Zilfa, 2016: 171: 172)

Pendidikan merupakan aspek yang sangat mendorong baiknya sumber daya manusia serta sebagai identitas suatu daerah yakni melalui pendidikan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal terdiri dari beberapa mata pelajaran yang berfungsi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan (Mulyasa, 2007: 272- 273). Salah satu pendidikan penting yang harus ditanamkan yakni pendidikan dalam kurikulum berbasis muatan lokal, dimana dalam kurikulum ini adanya integrasi antara mata pelajaran dengan budaya lokal daerah setempat.

Muatan lokal sebagai komponen dalam kurikulum memiliki fungsi yakni fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, dan fungsi perbedaan (Idi, 2014). Muatan lokal yang perlu dilaksanakan di sekolah yaitu muatan lokal bahasa Gorontalo, membuat karawo, budaya dan adat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal. Hal tersebut dikarenakan peserta didik pada zaman sekarang yang mulai kurang mengetahui tata krama atau unggah- unggah dan sopan santun berbicara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelajaran muatan lokal bahasa Gorontalo dan adat budaya Gorontalo di sekolah.

Provinsi Gorontalo sendiri telah menerapkan hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang kurikulum muatan lokal. Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka percepatan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di Daerah; dan mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Harapan ideal dari peraturan daerah ini agar tercipta pengetahuan dan keterampilan siswa mengenai budaya lokal yang baik. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati (Agustino, 2008:139).

Namun kenyataannya banyak ditemukan bahwa kebijakan muatan lokal yang diterapkan di sekolah masih belum optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor krusial. Kewajiban sekolah dalam penyelenggaraan kurikulum muatan lokal masih sebatas pada mata pelajaran saja tanpa ada praktek harian yang dilakukan misalnya berbahasa daerah pada 1 hari tertentu. Kemudian dapat pula dilihat dari dinas pendidikan dan kebudayaan setempat yang kurang memperhatikan dan mengawasi adanya kebijakan ini bahkan kurang mensosialisasikan batasan dan raw model dalam kurikulum muatan lokal yang dimaksudkan dalam peraturan daerah tersebut. Sehingga dalam mata pelajaran mulok dan prakarya kewirausahaan kurang diintegrasikan dengan hal-hal budaya lokal seperti pembuatan karawo atau alat musik khas Gorontalo.

Pada implementasinya kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Gorontalo belum sepenuhnya optimal dimana pemerintah melalui Dinas pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota belumlah maksimal dalam penyampaian hal ini kepada sekolah dan masyarakat. Dengan belum optimalnya hal ini maka peraturan daerah belumlah dijalankan dengan maksimal. Hal ini selain dipengaruhi

oleh hal tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan interpretasi dan implementasi di lapangan yang masih belum maksimal yang dapat dilihat dari komunikasi dan koordinasi yang kurang baik dan kurang aplikatif serta belum adanya pendekatan-pendekatan yang sesuai dalam memaksimalkan kurikulum lokal.

Sehingga dengan demikian, implementasi kurikulum muatan lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal dipengaruhi oleh faktor implementasi sebagaimana menurut Edward III dalam Kadji (2008;40) menyarankan untuk lebih memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni *communications* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions or attitudes* (sikap pelaksana) dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Namun dalam penelitian hanya difokuskan pada 3 faktor karena pada dasarnya struktur birokrasi di Provinsi sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan baiknya prestasi dari LPPD Provinsi Gorontalo selama 5 tahun terakhir. Kemudian memfokuskan pada 3 faktor tersebut juga karena dalam implementasinya struktur birokrasi dari semua elemen pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dapat bekerja sama dengan optimal.

Komunikasi yang baik akan menciptakan hasil yang baik pula dalam kebijakan publik yakni implementasi Kurikulum Muatan Lokal, namun kenyataan di lapangan ditemukan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar pelaksana kebijakan belum terjalin dengan baik kemudian temuan dari hasil supervisi oleh pengawas sekolah akan hal ini kurang didokumentasikan untuk mendapatkan tindak lanjut bagi oleh pemerintah Provinsi maupun sekolah bersangkutan yang kurang optimal dalam melaksanakan amanah dalam peraturan daerah tersebut. Implementasi suatu kebijakan cenderung menjadi tidak efektif, meskipun perintah-perintah implementasi diteruskan (ditransmisikan) secara cermat, jelas dan konsisten, apabila memiliki kekurangan sumber-sumber yang diperlukan oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Permasalahan mengenai sikap pelaksana dapat dilihat dari kompetensi dari pelaksana dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam implementasi kurikulum muatan lokal. Sementara itu permasalahan mengenai sikap pelaksana yakni pada sikap dan komitmen dari pelaksana yang tidak sesuai harapan serta adanya sikap skeptis dari warge sekolah yang bertindak sebagai pengambil keputusan di sekolah misalnya karena merasa bahwa tidak semua bisa memahami kearifan lokal yang ada di Provinsi Gorontalo karena tidak semuanya orang Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Gorontalo serta Sekolah Menengah Atas di Provinsi Gorontalo. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini selama 4 bulan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian dapat dijabarkan pada tabel definisi operasional sebagai berikut ini:

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional (Indikator)	Skala
Komunikasi	1. Transformasi (<i>transmission</i>) 2. Kejelasan (<i>clarity</i>) 3. Konsistensi (<i>consistency</i>) (Tachjan, 2006:57)	Likert
Sumber daya	1. Penempatan pegawai staf 2. Informasi 3. Kejelasan wewenang 4. Fasilitas (sarana dan prasarana) 5. Sumber daya keuangan (Sabarno, 2008;40)	Likert
Sikap pelaksana	1. Komitmen 2. Loyalitas dan etos kerja 3. Kejujuran 4. Sifat demokratik 5. Insentif (motivasi) (Sabarno, 2008: 43)	Likert
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) (Y)	1. Kesesuaian rumusan 2. Kesesuaian pelaksanaan 3. Kesesuaian sasaran/ target sesuai 4. Kesesuaian lingkungan	Likert

Sirajudin (2014: 4-5)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris Dinas, 10 orang di bidang kebudayaan dan 4 orang dari masing-masing pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru Berdasarkan jumlah populasi di atas maka sampel pada penelitian ini sebanyak 53 orang yakni 25% dari keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan statistik inferensial (regresi berganda). persamaan regresi berganda disajikan berikut ini:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

\hat{Y} = Implementasi Peraturan Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Komunikasi (*communications*)

X_2 = Sumber daya (*resources*)

X_3 = Sikap pelaksana (*dispotions or attitudes*)

ϵ = Tingkat Kesalahan (*error*)

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Deskriptif Variabel

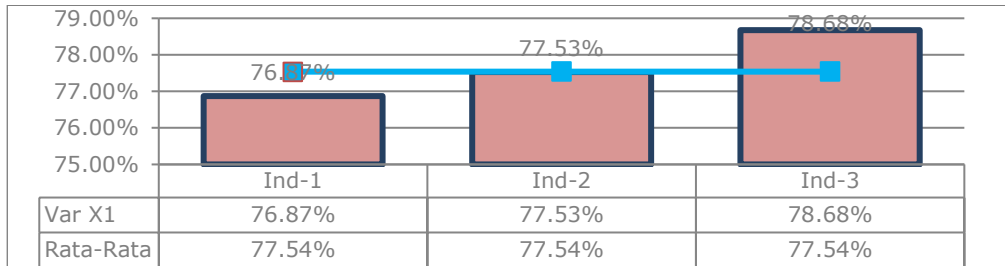
Variabel Penelitian	Jumlah Butir	Skor Teoritik		Skor Data Empirik		Rata-Rata	Std. Deviasi	Skor	Kriteria
		Min	Max	Min	Max				
Komunikasi	25	25	125	66.00	125.00	96.92	14.90	77.54%	Cukup Baik
Sumber daya	25	25	125	58.00	125.00	92.17	19.53	73.74%	Cukup Baik
Sikap pelaksana	25	25	125	58.00	125.00	97.68	15.94	78.14%	Cukup Baik
Implementasi Perda	25	25	125	68.00	125.00	98.53	13.98	78.82%	Cukup Baik

Sumber: Pengolahan Data Excel, 2019

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas maka dapat diinterpretasikan hasil masing-masing skor sebagai berikut ini:

Variabel Komunikasi (*communications*)

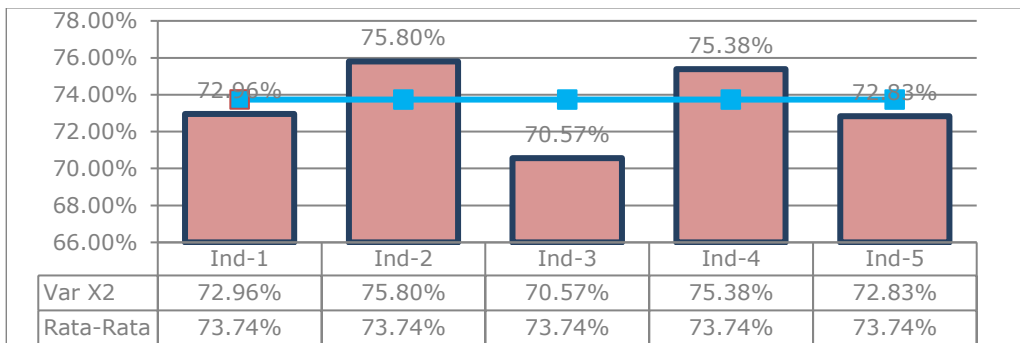
Berdasarkan hasil pada Tabel 2 terlihat bahwa variabel komunikasi (*communications*) memiliki nilai terendah sebesar 66 satuan dengan nilai tertinggi sebesar 125 satuan. Adapun nilai rata-rata sebesar 96,92 satuan dengan standar deviasi sebesar 14,90 satuan. Antara rata-rata dan standar deviasi jika dibandingkan maka nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sehingga variabel komunikasi (*communications*) dapat diinterpretasikan melalui nilai rata-rata. Adapun gambaran mengenai skor tiap indikator dari variabel komunikasi (*communications*) disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. Skor Tiap Indikator Variabel Komunikasi (*Communications*)

Variabel Sumber daya (*resources*)

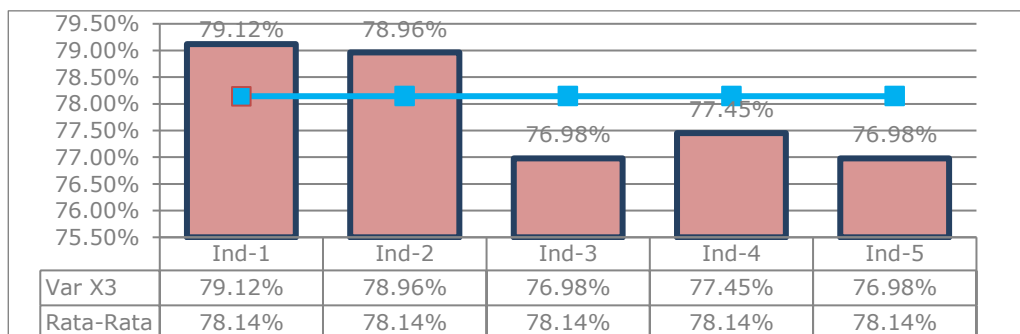
Berdasarkan Tabel 2 tersebut terlihat bahwa variabel sumber daya (*resources*) memiliki nilai terendah sebesar 58 satuan dengan nilai tertinggi sebesar 125 satuan. Adapun nilai rata-rata sebesar 92.17 satuan dengan standar deviasi sebesar 19.53 satuan. Antara rata-rata dan standar deviasi jika dibandingkan maka nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sehingga variabel sumber daya (*resources*) dapat diinterpretasikan melalui nilai rata-rata. Adapun gambaran mengenai skor tiap indikator dari variabel sumber daya (*resources*) disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. Skor Tiap Indikator Variabel Sumber Daya (*Resources*)

Variabel Sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*)

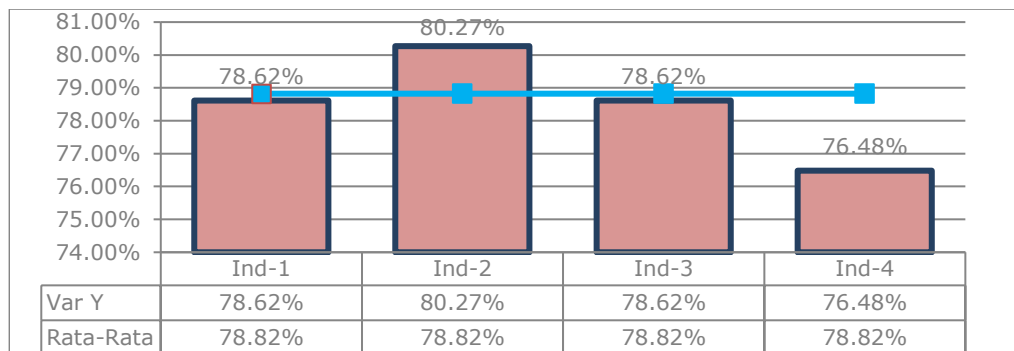
Berdasarkan Tabel 2 tersebut terlihat bahwa variabel sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) memiliki nilai terendah sebesar 58 satuan dengan nilai tertinggi sebesar 125 satuan. Adapun nilai rata-rata sebesar 97.68 satuan dengan standar deviasi sebesar 15.94 satuan. Antara rata-rata dan standar deviasi jika dibandingkan maka nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sehingga variabel sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) dapat diinterpretasikan melalui nilai rata-rata. Adapun gambaran mengenai skor tiap indikator dari variabel sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) disajikan sebagai berikut:



Gambar 3. Skor Tiap Indikator Variabel Sikap Pelaksana (*Dispotitions or Attitudes*)

Variabel kinerja organisasi dalam implementasi kurikulum muatan lokal

Berdasarkan Tabel 2 tersebut terlihat bahwa variabel kinerja organisasi dalam implementasi kurikulum muatan lokal memiliki nilai terendah sebesar 68 satuan dengan nilai tertinggi sebesar 125 satuan. Adapun nilai rata-rata sebesar 98.53 satuan dengan standar deviasi sebesar 13.98 satuan. Antara rata-rata dan standar deviasi jika dibandingkan maka nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sehingga variabel kinerja organisasi dalam implementasi kurikulum muatan lokal dapat diinterpretasikan melalui nilai rata-rata. Adapun gambaran mengenai skor tiap indikator dari variabel kinerja organisasi dalam implementasi kurikulum muatan lokal disajikan sebagai berikut:



Gambar 4. Skor Tiap Indikator Variabel Implementasi Perda

Hasil Regresi dan Parsial (Uji t)

Hasil analisis dengan bantuan program SPSS ditampilkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8.174	4.841		1.689	.098
Communications	.299	.144	.287	2.073	.043
Resources	.245	.076	.285	3.211	.002
Dispositions/Attitudes	.385	.134	.408	2.869	.006

^{ns}not significant (Tidak Signifikan)
 *. Significant at the 0.1 level (2-tailed).
 **. Significant at the 0.05 level (2-tailed).
 ***. Significant at the 0.01 level (2-tailed)

Sumber: Data olahan SPSS 21, 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas, model regresi linear berganda adalah:

$$\hat{Y} = 8,174 + 0,299X_1 + 0,245X_2 + 0,385X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

Komunikasi (*communications*)

Nilai signifikansi t_{hitung} untuk variabel komunikasi (*communications*) sebesar 0,043. Nilai signifikansi komunikasi (*communications*) lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai ($0,049 < 0,05$), maka komunikasi (*communications*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo.

Sumber daya (*resources*)

Nilai signifikansi t_{hitung} untuk variabel sumber daya (*resources*) sebesar 0,002. Nilai signifikansi sumber daya (*resources*) lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai ($0,002 < 0,05$), maka

sumber daya (*resources*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo.

Sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*)

Nilai signifikansi t_{hitung} untuk variabel sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) sebesar 0,006. Nilai signifikansi sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai ($0,006 < 0,05$), maka sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo.

Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Hasil pengujian simultan dengan bantuan program SPSS 21 ditampilkan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Pengujian Simultan

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10438.739	3	3479.580	85.014	.000 ^b
	Residual	2005.541	49	40.929		
	Total	12444.281	52			

Sumber: Pengolahan Data SPSS 21, 2023

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai F_{hitung} penelitian ini sebesar 85,014 dengan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000. nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Sehingga komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), dan sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo.

Pengujian Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi disajikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.916 ^a	.839	.829	6.39761

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2023

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka *adjusted R Square* adalah sebesar 0,829. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 82,90% variabilitas implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan oleh komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), dan sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*), sedangkan sisanya sebesar 17,10% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti struktur birokrasi, mental pelaksana kebijakan, sistem yang digunakan, jejaring kerja sama serta interpretasi dan pemahaman pelaksana mengenai kebijakan peraturan daerah. Selanjutnya dilakukan pengujian koefisien parsial. Hasil pengujian untuk koefisien determinasi parsial dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 6. Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients	Korelasi	Determinasi	
			Value	%
Communications	0.287	0.868	0.249	24.90%
Resources	0.285	0.804	0.229	22.90%
Dispotitions/Attitudes	0.408	0.883	0.360	36.10%
Koefisien Determinasi Simultan			0.839	83.90%

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2023

PEMBAHASAN

Pengaruh Komunikasi (*Communications*) terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal

Hasil pengujian deskriptif ditemukan bahwa variabel komunikasi (*communications*) adalah sebesar 77,54% yang berada pada kategori "cukup baik". Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi senantiasa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga agar implementasi Kurikulum Muatan Lokal dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi dan koordinasi agar berbagai hal penting dalam implementasi Peraturan daerah bisa lebih jelas dan konsisten pelaksanaannya.

Supriyanto, dkk (2018) mengatakan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa nilai signifikansi t_{hitung} untuk variabel komunikasi (*communications*) sebesar 0,043. Nilai signifikansi komunikasi (*communications*) lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai ($0,049 < 0,05$), maka komunikasi (*communications*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 24,90%. Semakin baik komunikasi (*communications*) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) maka akan meningkatkan keberhasilan dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan dari Winarno (2014: 149) bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian dikarenakan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidajelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Serta perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah suatu konsistensi dan jelas

Pengaruh Sumber Daya (*Resources*) terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal

Hasil pengujian deskriptif ditemukan bahwa skor sumber daya (*resources*) adalah sebesar 73,74% yang berada pada kategori yang "cukup baik". Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya menjadi salah satu penunjang penting dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal karena dengan adanya sumber daya berupa anggaran dan fasilitas maka akan memberikan dampak yang baik agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana karena sumber daya yang memadai memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaksana kebijakan peraturan daerah.

Hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa nilai signifikansi t_{hitung} untuk variabel sumber daya (*resources*) sebesar 0,002. Nilai signifikansi sumber daya (*resources*) lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai ($0,002 < 0,05$), maka sumber daya (*resources*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 22,90%. Semakin memadai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Gorontalo maka akan semakin baik pula implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo.

Hasil ini sesuai dengan pendapat dari Agustino (2008: 142) bahwa sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan itu sangat dibutuhkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dan pelaksana kebijakan, anggaran dibutuhkan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menjadi penghambat proses kebijakan. Sedangkan

waktu adalah bagian terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu merupakan pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan salah satu penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Pengaruh Sikap Pelaksana (*Dispotitions or Attitudes*) terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal

Hasil pengujian deskriptif ditemukan bahwa skor sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) adalah sebesar 78,14% yang berada pada kategori yang "cukup baik". Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan implementasi Kurikulum Muatan Lokal memiliki sikap yang diharapkan agar pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Adanya kompetensi dan komitmen dari pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta kepala sekolah masing-masing SMA, membuat implementasi Kurikulum Muatan Lokal bisa berjalan sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi tersebut.

Hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa nilai signifikansi t_{hitung} untuk variabel sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) sebesar 0,006. Nilai signifikansi sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai ($0,006 < 0,05$), maka sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 36,10%. Semakin sesuai sikap pelaksana kebijakan yakni Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga beserta Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Gorontalo maka akan menunjang keberhasilan implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo.

Hal ini sejalan dengan temuan dari Windiani (2018) bahwa tidak semua pejabat publik memiliki interpretasi yang sama terhadap produk aturan tersebut. Berbeda-bedanya interpretasi terhadap aturan tersebut, dipengaruhi banyak faktor antara lain: Pertama, Perda tentang pelayanan publik ini relative masih baru, sehingga petunjuk teknis untuk dilaksanakan di tiap-tiap instansi belum ada. Kedua, tiap-tiap instansi atau penyelenggara layanan memiliki bidang pelayanan dan karakteristik yang berbeda sehingga interpretasi terhadap perda tersebut menjadi berbeda pula. Ketiga, tidak adanya acuan yang seragam dan jelas dalam menginterpretasikan aturan dari pemerintah. Keempat. Belum berubah sepenuhnya paradigma di kalangan aparat pemerintah yang harus 'memberikan pelayanan' bukan untuk 'dilayani'.

Pengaruh Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Dan Sikap Pelaksana (*Dispotitions or Attitudes*) terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal

Hasil pengujian deskriptif ditemukan bahwa skor capaian untuk variabel implementasi Kurikulum Muatan Lokal adalah sebesar 78,82% yang berada pada kategori yang "cukup baik". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga beserta Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Gorontalo sudah mampu untuk menerapkan berbagai poin penting dalam pelaksanaan Peraturan daerah tersebut. Hal ini dapat terlihat dari adanya kewajiban dalam berbahasa Gorontalo bahkan adanya integrasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum lokal melalui mata pelajaran muatan lokal di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Meski demikian, pada daerah perkotaan khususnya di Kota Gorontalo program ini mulai sulit diterapkan karena tantangan pluralisme masyarakat Kota Gorontalo yang sudah banyak berasal dari luar Gorontalo, sehingga anaknya kurang memahami konteks dari pelaksanaan program ini di sekolah-sekolah.

Hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000. nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), dan sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo. Besarnya koefisien determinasi atau angka *adjusted R Square* adalah sebesar 0,829. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 82,90% variabilitas implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan oleh komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), dan sikap pelaksana (*dispotitions or attitudes*), sedangkan sisanya sebesar 17,10% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti struktur birokrasi, mental pelaksana kebijakan, sistem yang digunakan, jejaring kerja sama serta interpretasi dan pemahaman pelaksana mengenai kebijakan peraturan daerah.

Hasil secara keseluruhan didukung pula oleh hasil wawancara yang dilakukan dimana diperoleh bahwa implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo sudah dilakukan dengan baik dimana sikap pelaksana menjadi penentu paling krusial terutama menyangkut komitmen guru dan kepala sekolah di lapangan. Kemudian yang kurang optimal yakni sumber daya karena implementasi kurikulum ini harus memperhatikan banyaknya murid yang bukan berasal dari daerah Gorontalo. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Wantu, dkk (2015) bahwa suatu kebijakan publik harus menyentuh berbagai etnis dan bersifat multikultural. Sehingga peraturan daerah ini harus lebih disesuaikan lagi dan harus ada reward dan sanksi atas peraturan daerah ini.

Hasil ini secara keseluruhan sejalan dengan temuan dari Zilfa (2016) bahwa desentralisasi pendidikan membawa perubahan bagi wajah pendidikan di daerah, karena pemerintah daerah memiliki keleluasaan serta wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya di daerah. Termasuk pemetaan kebutuhan serta problem yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi (*communications*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal dengan nilai determinan sebesar 24,90%.
2. Sumber daya (*resources*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal dengan nilai determinan sebesar 22,90%.
3. Sikap pelaksana (*dispositions or attitudes*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal dengan nilai determinan sebesar 36,10%.
4. Komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), dan sikap pelaksana (*dispositions or attitudes*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal dengan nilai determinan sebesar 82,90%.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Idi, A. (2014). Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kadji, Y. (2008). Implementasi Kebijakan Publik "Dalam Perspektif Dalam Realitas". Tulung Agung: Penerbit Cahaya Abadi
- Muhammad, M. & Barnawi. (2011). Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan, Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Mulyasa, E. (2007). Menjadi Guru Profesional menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: Rosdakarya
- Supriyanto, H. P. & Widowati, N. (2018). Hubungan Komunikasi dan Sikap dengan Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kawasan Simpang Lima Semarang. Jurnal. Administrasi Publik Universitas Diponegoro
- Wantu, S. M.; Hamim, U; Tamu, Y; & Lukum, R. (2015). Kebijakan Pemerintah Lokal Etnisitas dan Multikulturalisme. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta.
- Winarno, B. (2014). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media. Pressindo
- Windiani. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Publik Di Kota Surabaya. Jurnal Sosial Humaniora, Vol.1 No.2.
- Zilfa, Rohil. (2016). Desentralisasi Pendidikan; Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Jurnal JOIES:

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS

P-ISSN 2620-9551

E-ISSN 2622-1616

JAMBURA: Vol 6. No 1. Mei 2023

Website Jurnal: <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB>

Journal of Islamic Education Studies Volume 1, Nomor 1, Juni 2016; p-ISSN 2540-8070, e-ISSN 2541-173X.